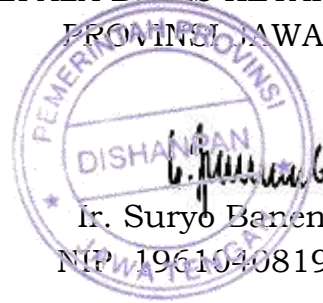


LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Ungaran, 2017
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



Ir. Suryo Banendro, M.P.
NIP. 196104081989031006

DAFTAR ISI

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor	Tahun 2017 tentang
Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
Tahun 2018	i
Lembar Pernyataan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH URUSAN PANGAN.....	II-1
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Tahun 2013 2018.....	II-1
2.2 Analisa Kinerja PelayananDinas Ketahanan Pangan Tahun 2013 – 2018	II-13
2.3 Isu –isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan.....	II-17
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	II-22
BAB III TUJUAN, SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan	III-1
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan	III-3
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016	II-11
Tabel 2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	II-14
Tabel 2.3	Reviu Terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2018	II-23
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-26
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Urusan Pangan.....	III-2
Tabel 3.2.	Program Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	III-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Urusan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 telah memasuki periode perencanaan pembangunan jangka menengah Tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah , yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Rencana pembangunan urusan pangan tahun 2018 dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 ini yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Memperhatikan ketentuan peraturan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 1 ayat 11, menetapkan ketentuan umum mengenai Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah atau Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 273 menyatakan Rencana Strategis dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5/2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta hasil evaluasi Renstra BKP Tahun 2013-2018 dilakukan perubahan terhadap Renstra BKP Tahun 2013-2018 menjadi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2013 -2018.

Memperhatikan ketentuan proses penyusunan dan penetapan Renja SKPD mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 disusun melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu:(1) Persiapan Penyusunan Rancangan Renja; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renja; (3) Penyempurnaan Rancangan Renja; (4) Penyusunan Rancangan Akhir; (5) Verifikasi Rancangan Renja dan (6) Penetapan Renja DISHANPAN Tahun 2013-2018.

Renja DISHANPAN Tahun 2018 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renja DISHANPAN Tahun 2018 merupakan penjabaran Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018 sebagai dokumen perencanaan tahunan DISHANPAN yang memuat prioritas program dan kegiatan. Renja DISHANPAN Tahun 2018 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang didalamnya memuat tujuan, sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pangan dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
26. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 147 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Provinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja DISHANPAN Tahun 2018 disusun dengan maksud:

- a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah urusan pangan tahun 2018;
- b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah urusan pangan tahun 2018.

2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk :

- a. Memberikan landasan operasional bagi seluruh bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2018;
- b. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DISHANPAN Tahun 2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Pangan

Bab ini memaparkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan realisasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; permasalahan pembangunan daerah ; serta isu strategis pembangunan ketahanan pangan.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2018

Memuat telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja serta Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018

Bab IV. Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan kegiatan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
URUSAN PANGAN

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Tahun 2013 - 2018

Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah dilaksanakan 3 program yaitu : (1) Peningkatan Ketahanan Pangan; (2) Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan; serta (3) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. Realisasi indikator kinerja program tahun 2016 terhadap target, dengan hasil 7 indikator (100%) tercapai. Indikator yang sesuai target, yaitu : Jumlah regulasi kedaulatan pangan dan Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah. Adapun lima indikator lainnya tercapai melebihi target yaitu : Ketersediaan pangan utama beras; Persentase penguatan cadangan pangan; Persentase penanganan daerah rawan pangan; Skor Pola Pangan Harapan dan Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

Realisasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2017) mengacu pada APBD 2017 secara terinci dituangkan pada Tabel 2.1. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan sebanyak 50 kegiatan. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil sebanyak 47 kegiatan. Adapun kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran sebanyak 3 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat, Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan serta Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayur Segar.

Keselarsan proses perencanaan dan penganggaran, pemantauan rutin mendorong tercapainya kinerja hasil/keluaran sesuai target. Adapun kinerja hasil/keluaran yang melebihi target dicapai karena adanya keberhasilan produksi padi (beras) yang mendapat dukungan pembiayaan APBN dan tingginya minat pengusaha pangan segar asal tumbuhan mengajukan proses pendaftaran registrasi pangan segar asal tumbuhan.

TABEL 2.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan s.d Tahun 2017	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	60	24	12	12	100	12	12	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BKP Provinsi Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
3	Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya jaminan barang BKP Provinsi Jateng	5	2	1	1	100	1	1	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor/rumah dinas Sekretariat	Terpeliharanya kebersihan kantor	60	24	12	12	100	12	12	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat	Terpenuhinya alat tulis kantor bagi kegiatan BKP Provinsi Jateng selama 1 tahun terpenuhi	60	24	12	12	100	12	12	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan untuk administrasi kantor	60	24	12	12	100	12	12	100

2018 |

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan s.d Tahun 2017	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat	Terpenuhinya instalasi penerangan kantor BKP Provinsi Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat	Kebutuhan rumahtangga terpenuhi kantor	60	24	12	12	100	12	12	100
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Sekretariat	Penyediaan bahan bacaan dan perundangan terpenuhi	60	24	12	12	100	12	12	100
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat	Kebutuhan makan dan minum kegiatan bagi tamu terpenuhi	60	24	12	12	100	12	12	100
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	60	24	12	12	100	12	12	100
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat	Terpenuhinya pelayanan perkantoran BKP Provinsi Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
13	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat	Terlaksananya publikasi ketahanan pangan	5	2	1	1	100	1	1	100

2018

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan s.d Tahun 2017	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
14	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat	Terpenuhinya operasional kebutuhan transportasi dinas	4	1	0	0	-	-	-	-
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat	Terpeliharanya gedung kantor BKP Prov. Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	60	24	12	12	100	12	12	100
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor BKP Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat	Terpeliharanya meubelair kantor BKP Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga BKP Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100

2018

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan s.d Tahun 2017	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
20	Kegiatan Pemeliharaan Buku- Buku Perpustakaan Sekretariat	Terlaksananya pemeliharaan buku perpustakaan BKP Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
21	Kegiatan Peningkatan Sarana Aparatur Sekretariat	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kantor	60	24	12	12	100	-	-	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
22	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas	3	2	1	1	100	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur									
23	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat	Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal	60	24	12	12	100	12	12	100
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
24	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat BPCP	Terpenuhinya jasa surat menyurat	60	24	12	12	100	12	12	100

2018

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan s.d Tahun 2017	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BPCP	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik BPCP	60	24	12	12	100	12	12	100
26	Penyediaan Alat Tulis Kantor BPCP	Terpenuhinya Aalat tulis kantor Kegiatan BPCP Prov. Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BPCP	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan untuk administrasi, cetak plastik, karung kemasan cadangan pangan BPCP Prov. Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
28	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPCP	Terpenuhinya instalasi penerangan kantor BPCP Prov. Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
29	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BPCP)	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor BPCP Prov. Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
30	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BPCP	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan kantor BPCP Prov. Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100

2018 |

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan s.d Tahun 2017	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
31	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman BPCP	Terpenuhinya kebutuhan makan minum kegiatan bagi pegawai BPCP Prov. Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
32	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan perkantoran BPCP Prov. Jateng			12	12	100	12	12	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
33	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPCP	Terpeliharanya gedung kantor BPCP Prov. Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
34	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BPCP	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan RMU BPCP Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
35	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BPCP	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga BPCP Jateng	60	24	12	12	100	12	12	100
36	Peningkatan Sarana Aparatur dan Prasarana Kantor BPCP	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kantor BPCP	60	24	12	12	100	12	12	100

2018

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan s.d Tahun 2017	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	Program Pendidikan Non Formal dan Informal									
37	Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	Terselenggaranya Pelatihan Bagi Masyarakat	3600	2400	1200	1200	100	-	-	-
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan									
38	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	jumlah regulasi ketahanan pangan	5	2	1	1	100	1	1	100
39	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	ketersediaan pangan beras	5.816.198	6.562.656	5.769.946	6.816.713	118,15	5.793.026	6.816.753	117,67
40	Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	Jumlah Desa Mandiri Pangan (baru)	120	42	24	24	100	26	26	100
41	Kegiatan Fasilitas Lumbung Pangan Masyarakat	jumlah lumbung pangan masyarakat yang dikembangkan	160	40	40	40	100	40	40	100

2018

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan s.d Tahun 2017	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
42	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Terfasilitasinya tunda jual bahan pangan (gabah) dan sarana distribusi	290	116	58	58	100	58	58	100
43	Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis	Informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis	35	35	35	35	100	35	35	100
44	Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	333	263.722	300	310	110,33	317	331	100
	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan									
45	Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	Jumlah KWT pekarangan yang difasilitasi dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan yang B2SA	550	245	110	112	100,82	115	115	100

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan s.d Tahun 2017	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
46	Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah KWT pengolah pangan alternatif yang difasilitasi dalam pengembangan pangan alternatif	220	82	44	44	100	46	46	100
	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan									
47	Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah sampel pangan aman	80	91.74	80	96.58	120,73	80	80	100
		Jumlah kantin sekolah yang difasilitasi	126	82	44	44	100	-	-	-
		Jumlah pelaku /kelompok pangan segar yang terfasitasi	60	0	0	0	-	30	30	100
48	Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayur Segar	Jumlah Sertifikasi Prima 3 produk pangan segar	60	27	12	13	108	6	6	100
		Jumlah Nomor Pendaftaran PSAT	110	84	22	39	177	30	30	100
	Program Pengembangan Agribisnis									

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan s.d Tahun 2017	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
49	Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Usaha Agribisnis Pedesaan	Jumlah kawasan agribisnis yang difasilitasi	12	12		-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani									
50	Kegiatan Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang difasilitasi	40	40	0	-	-	-	-	-

TABEL 2.1.a. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016 YANG TIDAK MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI	KETERANGAN
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

TABEL 2.1.b. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016 YANG TELAH MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI	KETE-RANGAN
I	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
1	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Target Tercapai	
2	Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Target Tercapai	
3	Kegiatan Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Target Tercapai	
4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Target Tercapai	
5	Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Target Tercapai	
6	Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Target Tercapai	
II	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan			
1	Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Target Tercapai	

TABEL 2.1.c. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016 YANG MELEBIHI MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIA-TAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI	KETE-RANGAN
I	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
1	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	Ada peningkatan produksi padi (beras)	Keterse-diaan beras meningkat	
2	Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah	Harga pengadaan CPP lebih rendah dibandingkan harga saat perencanaan	Jumlah CPP yang dibeli semakin besar (T: 300 Ton/ R : 310 Ton)	
II	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan			
1	Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan	Mengakomo-dir Usulan Masyarakat	Usulan Terako-modir	

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIA-TAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI	KETE-RANGAN
	Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA			
III	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan			
1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	Kesadaran produsen dan pedagang pangan segar asal tumbuhan terhadap keamanan pangan semakin baik	Perbaikan layanan kepada masyarakat	
2	Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayur Segar	Kesadaran pengusaha pangan segar mendapatkan registrasi pangan segar asal tumbuhan meningkat	Perbaikan layanan kepada masyarakat	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2013 – 2018

Pengukuran kinerja pelayanan DISHANPAN dilaksanakan melalui evaluasi kinerja BKP Tahun 2014 – 2016 mengingat BKP merupakan SKPD pelaksana urusan pangan pada kurun waktu tersebut dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018 dan 2019. Hasil analisis tertuang pada Tabel 2.2.

Berdasarkan data pada Tabel 2.2. dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari BKP dari seluruh indikator kinerja outcome tercapai sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik. Evaluasi kinerja pelayanan tersebut menjadi landasan bagi penyusunan Renja DISHANPAN Tahun 2018.

Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah dilaksanakan 3 program yaitu : (1) Peningkatan Ketahanan Pangan; (2) Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan; serta (3) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. Realisasi indikator kinerja program tahun 2016 terhadap target, dengan hasil 7 indikator (100%) tercapai. Indikator yang sesuai target, yaitu : Jumlah regulasi kedaulatan pangan dan Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah. Adapun lima indikator lainnya tercapai melebihi target yaitu : Ketersediaan pangan utama beras; Persentase penguatan cadangan pangan; Persentase penanganan daerah rawan pangan; Skor Pola Pangan Harapan dan Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

TABEL 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -				Realisasi Capaian Tahun ke -		Proyeksi Capaian Tahun ke-		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Regulasi kedaulatan pangan		v	1	1	1	na	1	1	1	na	Tahun 2017 telah disusun Regulasi ttg pengelolaan pangan lokal Tahun 2018 direncanakan akan disusun regulasi berkaitan dengan cadangan pangan
2	Ketersediaan pangan utama (ton beras)	v	v	5.769.946	5.793.026	5.816.198	na	6.831.297	6.831.297	6.831.297	na	
3	Persentase penguatan cadangan pangan	v	v	90	95	100	na	103,7	95	100	na	Target pengadaan cadangan pangan TA 2017 : 317 Ton GKG TA 2018 : 333 Tln GKG Diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja renstra
4	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	v	v	100	100	100	na	100	100	100	na	
5	Persentase penanganan daerah rawan pangan	v	v	60	60	60	na	62,86	60	60	na	
6	Skor PPH	v	v	91,5	86	87	na	91,8	86	87	na	
7	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	v	v	80	80	80	na	96,58	80	80	na	

1. Jumlah Regulasi Kedaulatan Pangan

Regulasi kedaulatan pangan yang akan disusun berkaitan dengan Keamanan Pangan Segar. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah FGD Regulasi Kedaulatan Pangan dengan stakeholders, konsultasi dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dan penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Ditetapkannya Pergub No 40/2016 dalam rangka mendorong produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diedarkan di pasar aman untuk dikonsumsi, sesuai parameter cemaran mikroba, kandungan residu pestisida dan logam berat dibawah Batas Maksimum Residu.

2. Ketersediaan Pangan Utama Beras (Ton)

Ketersediaan pangan utama sebesar 6.816.753 Ton beras melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 5.769.946. Capaian kinerja ini didukung produksi padi Jawa Tengah berdasarkan Asem Tahun 2016 sebesar 11.473.161 Ton GKG. Indikator ini digunakan untuk memastikan seberapa banyak ketersediaan pangan utama (beras) di Jawa Tengah untuk mengantisipasi kekurangan bahan pangan di daerah.

3. Persentase Penguatan Cadangan Pangan (%)

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tersedia pada Gudang BCP sebanyak 397,347 Ton GLG setara 207,408 Ton ekuivalen beras. Cadangan pangan yang tersedia berasal dari stok cadangan pangan per Januari 2016 sebesar 87.347 Kg GKG atau 52.408 Kg setara beras dan pengadaan cadangan pangan sebanyak 310.000 Kg GKG atau 155.000 Kg Setara Beras. Persentase penguatan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sebesar 103,7% lebih tinggi dibandingkan target 90% namun menurun dibandingkan tahun 2015, karena rendemen tahun 2016 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Realisasi di tahun 2015 sebesar 130,57%.

4. Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)

Informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi dan kabupaten kota untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan. Target komoditas yang dipantau sebanyak 7 komoditas meliputi beras, minyak goreng, cabai merah keriting, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi. Target lokasi 28 Kab/Kota dengan target waktu selama 52 minggu.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar pangan terjangkau masyarakat dilaksanakan berbagai upaya seperti koordinasi lintas sektor, pemantauan dan rakor terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), selain itu juga dilaksanakan kegiatan padat karya pangan di 29 desa di 28 kab melalui pembangunan jalan desa. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dilaksanakan dengan memfasilitasi 58 gapoktan LDPM di 29 Kabupaten dalam bentuk gabah sebagai sarana tunda jual dan benih padi untuk 58 gapoktan.

5. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)

Penanganan daerah rawan pangan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan memperhatikan hasil Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2016 yang merupakan *early warning system* kejadian rawan pangan pada suatu wilayah. Untuk menganalisis siapa saja rumah tangga yang rawan pangan di kantong-kantong dilakukan investigasi di tingkat rumah tangga. Indeks komposit tahunan Analisis SKPG Tahun 2016

menunjukkan 35 kab/kota memiliki indeks komposit 3 (Merah). Realisasi persentase penanganan daerah rawan pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sebesar 62,86% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan 60% dan meningkat dibandingkan tahun 2015 yang tercapai 61,29%.

Kegiatan penanganan rawan pangan di Jawa Tengah Tahun 2016 melalui:

- a. Distribusi Bantuan Pangan oleh Balai Pengembangan Cadangan Pangan yang dilaksanakan sebanyak 28 kali pada 19 Kab yaitu Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Demak, Jepara, Kendal, Klaten, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Pati, Pekalongan, Purworejo, Rembang, Semarang, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri. Tahun 2016, jumlah cadangan pangan yang didistribusikan ke daerah rawan pangan sebesar 146.702 Kg beras.
- b. Desa Mandiri Pangan Tahun 2016 yang dilaksanakan pada 24 desa baru yang tersebar pada 6 kabupaten, yaitu Kebumen, Purbalingga, Wonogiri, Semarang, Banyumas, dan Batang.

6. Skor PPH

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis situasi konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor PPH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 sebesar 91,8 sudah melebihi target yang telah ditetapkan 91,5 dan lebih tinggi dari skor PPH Tahun 2015 yaitu 91,45. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 100,33%.

7. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 memberikan amanat pada Pemerintah Daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu (ayat 1) dan membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan (ayat 5). Selain itu, pada Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Keamanan Pangan merupakan salah satu sub urusan pangan yang mengamanatkan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Tahun 2016, jumlah sampel yang telah diuji mencapai 117 sampel, dengan hasil 96,58% berstatus aman lebih tinggi dengan target sebesar 80%. Pengawasan keamanan pangan segar dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- a. Pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (*Pre Market*)
Pengawasan ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum pangan segar diedarkan kepada konsumen akhir (Saat produksi, panen, grading, packing). Bentuk pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan mencakup : (i). Mekanisme sertifikasi prima 3, prima 2, GAP, GHP (registrasi packing house/pendaftaran rumah kemas) dan (ii) Mekanisme Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan. Pengawasan dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Jawa Tengah pada tahun 2016 telah menerbitkan 8 sertifikat Prima 3 dan 39 sertifikat PSAT baru.
- b. Pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran (*Post Market*)
Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern). Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan diperedaran

mencakup Pengawasan terhadap penerapan GRP (*Good Ritel Practices*) pada pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, maka dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba patogen dan logam berat). Pengawasan keamanan pangan dilakukan oleh Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) dengan SK Gubernur Nomor 525/9/2010, tanggal 10 Maret 2010. Pengawasan keamanan pangan segar di peredaran (*Post Market*) Tahun 2016 dilaksanakan pada 70 sampel pangan segar dengan hasil uji lab 66 sampel pangan aman.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Adanya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong dilakukannya penataan perangkat daerah hingga ditetapkan Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut menetapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Pasal 2). Pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) yang diatur dengan Pergub Jateng Nomor 66 Tahun 2016.

DISHANPAN mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui

serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
2. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang.
3. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
4. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) yang berpotensi menimbulkan rawan pangan.
5. Lemahnya akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan
6. Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar, dan sebagainya
7. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal.
8. Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
9. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang berpotensi menghambat akses fisik dan memicu terjadinya disparitas harga bahan pangan antar daerah dan ketidakstabilan harga.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Regulasi

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan UU Noor 18 Tahun 2012 berkonsekuensi pada regulasi turunan untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan sesuai yang diamanatkan pada Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Ketiadaan regulasi turunan dapat menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat Provinsi.

2. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan

Isu produksi dan ketersediaan pangan perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Jawa Tengah secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Jawa Tengah. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor.

Isu produksi pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang

diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

3. Penguatan Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

4. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan

Isu informasi harga, pasokan dan akses pangan diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan.

5. Penanganan Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

6. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

7. Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

8. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Isu ini stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

Peningkatan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan urusan pangan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain :

1. Perubahan Iklim Global

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta mengembangkan *delivery system* untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

2. Penanganan Kerawanan Pangan

Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

3. Perekonomian Global dan Pasar Bebas

Situasi perekonomian global salah satunya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pangan sehingga berdampak terhadap ketahanan pangan global yang dapat berimbas kepada ketahanan pangan daerah. Krisis ekonomi global beberapa tahun terakhir menyebabkan kelangkaan pangan di pasar global yang mempengaruhi

peningkatan harga pangan di dalam negeri. Untuk mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, Provinsi Jawa Tengah harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Berdasarkan situasi tersebut, kebijakan meningkatkan produksi pangan dalam negeri menjadi mutlak dilakukan.

Selain perekonomian global, ketahanan pangan Jawa Tengah juga dihadapkan pada tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas. Pemberlakuan pasar bebas memberikan peluang bagi produk pangan Jawa Tengah untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Sebaliknya, penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia. Peningkatan daya saing produk pangan domestik dan penguatan kapasitas sumberdaya pangan sangat diperlukan menghadapi pasar bebas .

4. Permasalahan Gizi (Malnutrition)

Peningkatan pendapatan terutama pada masyarakat perkotaan (urban) telah mengubah pada gaya hidup terutama pola makan. Telah terjadi perubahan konsumsi dari tinggi karbohidrat kompleks, tinggi serat dan rendah lemak menjadi karbohidrat sederhana, rendah serat dan tinggi lemak. Perubahan tersebut terjadi pada sebagian besar kelompok umur dari usia dibawah 5 tahun hingga dewasa. Selain diet yang tidak seimbang, aktivitas fisik rendah juga menjadi salah satu faktor resiko yang menyebabkan overweight dan obesitas.

5. Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

UU 23/2014 mengamanatkan pada Pemerintah Provinsi dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar Jawa Tengah akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

6. Kebutuhan Pangan untuk Kesehatan

Masyarakat modern yang peduli kesehatan menuntut makanannya setelah berfungsi sebagai pemasok zat-zat gizi dan cita rasa memuaskan, harus berfungsi menjaga kesehatan dan kebugaran. Kualitas sensoris, gizi, serta keamanan pangan tak luput dari pemenuhan selera gizi masyarakat. Tantangan industri pangan tidak jauh dari pemenuhan kemampuan gizi konsumen. Hal ini karena untuk memperoleh produk pangan yang bermutu baik dan terjamin bagi kesehatan, tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya penerangan pengendalian dan pengawasan dalam sistem jaminan mutu.

Selain tantangan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki beberapa peluang yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan urusan pangan, yaitu :

1. Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan Jawa Tengah
2. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan

- sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.
3. Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;
 4. Jawa Tengah memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
 5. Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu dilaksanakan melalui beberapa langkah sebagai berikut :

- (a) Identifikasi program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD;
- (b) membandingkan antara rancangana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Secara rinci hasil reviu tersaji pada Tabel 2.3.

Berdasarkan hasil reviu tersebut diketahui bahwa program kegiatan yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari 3 program prioritas pembangunan, yaitu : Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan sera Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

TABEL 2.3. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	
	Peningkatan Ketahanan Pangan		regulasi kedaulatan pangan	1 (satu)		Peningkatan Ketahanan Pangan		regulasi kedaulatan pangan	1 (satu)	11.990.120	Program , Indikator Kinerja dan Target Capaian pada Rancangan awal RKPD sama dengan Hasil analisis kebutuhan
			Ketersediaan pangan utama beras	5.816.198 ton				Ketersediaan pangan utama beras	5.816.198 ton		
			Persentase penguatan cadangan pangan	100%;				Persentase penguatan cadangan pangan	100%;		
			Persentase ketersediaan stok, harga dan akses pangan di daerah	100%				Persentase ketersediaan stok, harga dan akses pangan di daerah	100%		
			Persentase penanganan daerah rawan pangan	60%				Persentase penanganan daerah rawan pangan	60%		
	Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan		PPH	86		Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan		PPH	86	2.650.0000	
	Peningkatan Mutu dan		persentase pengawasan dan	80%		Peningkatan Mutu dan		persentase pengawasan dan	80%	1.330.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	
	Keamanan Pangan		pembinaan keamanan pangan			Keamanan Pangan		pembinaan keamanan pangan			
	Pelayanan Adminis-trasi Perkantoran		Tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi	1 SKPD		Pelayanan Adminis-trasi Perkanto-ran		Tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi	1 SKPD	2.286.200	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terlaksananya pemeliharaan gedung/ kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.	1 SKPD		Peningka-tan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terlaksananya pemeliharaan gedung/ kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.	1 SKPD	968.800	
	Peningkatan Disiplin Aparatur		Terlaksana-nya pengadaan	1 SKPD		Peningka-tan Disiplin Aparatur		Terlaksana-nya pengadaan	1 SKPD	0	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	
			pakaian dinas dan kelengkapannya.					pakaian dinas dan kelengkapannya.			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terlaksananya diklat dan bintek aparatur	1 SKPD		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terlaksananya diklat dan bintek aparatur	1 SKPD	50.000	
Jumlah										19.275.120	

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan dan kebutuhan pembangunan tahun 2018 sesuai tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

TABEL 2.4. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan/	Kab. Rem-bang	Pengembangan pemanfaatan peka-rangan	4 unit	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang
2	Pengembangan Diversifikasi Dan Pola Konsumsi Pangan/ Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	Kab. Suko-harjo	Sarana Prasarana pemanfaatan peka-rangan	4 unit	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang
3	Pengembangan Diversifikasi Dan Pola Konsumsi Pangan/ Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Kab. Suko-harjo	Alat pengola- han pangan lokal	2 lokasi	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang
4	Peningkatan Ketahanan Pangan/ Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Penguatan Akses Pangan	Kab. Suko-harjo	Bantuan gabah kepada Gapoktan	5 ton GKG x 2 desa	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang
5	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan/ Pembinaan Mutu Dan Keamanan Pangan	Kab. Suko-harjo (4 lokasi)	Sarana kantin sekolah	4 paket	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang
6	Peningkatan Ketahanan Pangan / Peningkatan Produksi Peternakan l	Kota Pekalongan	1. Tingkat konsumsi susu kambing di kota pekalongan meningkat 2. Kesejahte- raan peternakan kambing perah meningkat 3. Ketersediaan	40 ekor kambing dan 3600 kg konsentrat (40 ekor x 1 kg x 90 hari)	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang Tidak ada dalam Renja Dishanpan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
			protein hewani dalam hal ini sus kambing dan daging kambing meningkat		
7	Pangan/Program pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan/kegiatan Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA	Ds. Sugihwaras, Kec. Adimulyo; Ds. Sinungrejo, Kec. Ambal; Ds. Ampelsari, Kec. Petanahan; Ds. Pekuncen, Kec. Sempor; Ds. Selotumpeng, Kec. Ambal Kab Kebumen	Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi B2SA	5 paket	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang
		SDN Bumirejo 1 Kec. Kebumen; SDN Karangsari 1 Kec. Kebumen Kabupaten Kebumen	Intervensi pengenalan konsumsi pangan B2SA	2 paket	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang
8	Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan/ Pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Ds. Kedungwer, Kec. Ayah Kabupaten Kebumen	Pengem-bangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	1 paket	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang
9	Program peningkatan ketahanan pangan/ Pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) dan penguatan akses pangan	Gapoktan Tri Daya Ds. Smondo Kec. Gombong; Gapoktan Mitra Tani Ds. Grujugan Kec. Petanahan; Gapoktan Panca Jaya Ds. Candi Kec. Karanganyar Kabupaten Kebumen	Pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	3 gapoktan	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang
10	Pangan/Program peningkatan Katahanan Pangan/Keg Pengembangan Distribusi dan Peningkatan Kases Pangan	Ds. Puliharjo, Kec. Puring; Ds. Pejengkolan Kec. Padureso Kabupaten Kebumen	Pengembangan distribusi dan peningkatan akses pangan	2 desa	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang
11	Pangan/Program peningkatan Katahanan Pangan/Keg Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah		Pengembangan Cadangan Pangan (Lumbung)	2 lumbung	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
12	Pangan/Program pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan/ kegiatan Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA	Kab. Magelang	Optimallisasi pemanfaatan pekarangan	15 kelompok	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang
13	Pangan/Program pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan/ kegiatan Pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Kab. Magelang	Pengembangan olahan pangan lokal	5 kelompok	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang
14	Pangan/Program Peningkatan Ketahanan pangan/ kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Kab. Magelang	Lumbung pangan	3 kelompok	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang
15	Pangan / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Pengembangan Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan	Desa Gentawangi, Kecamatan Jatilawang Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak Klapagading Kecamatan Wangon Desa Gentawangi, Kecamatan Jatilawang Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak Randegan Kecamatan Kebasen Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja Desa Rawaheng Kecamatan Wangon Desa Pajerukan Kecamatan Kalibagor Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas Desa Gambarsari Kecamatan Kebasen Desa	Meningkat- katnya Ketersediaan pangan	18 lokasi	Diusulkan oleh Kab/Kota pada Musrenbang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
		Karangendep Kecapatan Patikraja Desa Kalicupak Kidul Kecamatan Kalibagor Desa Karangjati Kecamatan Kemranjen Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar Desa Wlahar wetan Kecamatan Kalibagor Kab. Banyumas			
16	Pengembangan Diversifikasi Dan Pola Konsumsi Pangan/ Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Desa. Cinyawang, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap	Peningkatan kualitas produk home industri jagung	1 paket	Usulan Masyarakat
17	Pengembangan Diversifikasi Dan Pola Konsumsi Pangan/ Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Desa Tambaksari, Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap	Peningkatan pengolahan produk pertanian	1 paket	Usulan Masyarakat
18	Pengembangan Diversifikasi Dan Pola Konsumsi Pangan/ Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Ds Wonosoco, Kec. Undaan Kab. Kudus	Peralatan jagung instan (oven nasi jagung 3 bh dan vacuum sealer 2 bh)	1 paket	Usulan Masyarakat
19	Pengembangan Diversifikasi Dan Pola Konsumsi Pangan/ Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Forum difabel Kab. Boyolali	bantuan modal dan Sarpras promosi produksi gula kencur	1 paket	Usulan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, Kementerian PPN/Bappenas memangkas prioritas nasional agar lebih fokus menjadi 10 prioritas nasional, antara lain: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) perumahan dan pemukiman; (4) pengembangan dunia usaha dan pariwisata; (5) ketahanan energi; (6) ketahanan pangan; (7) penanggulangan kemiskinan; (8) infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman; (9) pembangunan wilayah; dan (10) politik, hukum, dan pertahanan keamanan. Penyusunan program dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *money follow program*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2013-2018. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal. Hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

1. Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan
2. Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)
3. Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana
4. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
5. Tertanganinya daerah rawan pangan
6. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam
7. Meningkatnya keamanan pangan segar
8. Stabilitasnya harga pangan strategis

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN URUSAN PANGAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	Mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan	Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan	Jumlah regulasi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan	1	1	1	1	1
2		Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)	Ketersediaan pangan utama (Ton Beras)	5.724.620	5.746.958	5.769.946	5.793.026	5.816.198
3		Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Persentase penguatan cadangan pangan	75	80	90	95	100
4		Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	97	100	100	100	100
5		Tertanganinya daerah rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	55	60	60	60	60
6		Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan	90,75	91,13	91,5	86	87
7		Meningkatnya keamanan pangan segar	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	80	80	80	80
8		Stabilnya harga pangan strategis.	Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabe merah, bawang merah)	-	-	-	CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤ 35% CV bawang merah ≤ 30%	CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤ 35% CV bawang merah ≤ 30%

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan serta mendukung perwujudan Visi Misi Gubernur Jawa Tengah ditetapkan prioritas pembangunan ketahanan pangan Tahun 2018, yaitu :

1. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, cadangan pangan dan keterjangkauan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mandiri Pangan
3. Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan segar

Tahun 2018 merupakan tahun kelima pelaksanaan proram kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2013 – 2018. Program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- b. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan;
- c. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
- d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 terdapat beberapa kegiatan baru dan penyesuaian nomenklatur kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi Kemendagri atas Raperda APBD Perubahan Tahun 2016 (point 1a) dan mengakomodir Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Pergub Nomor 66/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (point 1b sampai dengan 7). Kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan antara lain:
 - a. Kegiatan Penyusunan Regulasi dan Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan
 - b. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan
 - c. Kegiatan Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan
 - d. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah
 - e. Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
 - f. Kegiatan Pemantauan Pasokan, Harga dan Stabilisasi Harga Pangan Strategis
 - g. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Peningkatan Akses Pangan
 - h. Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat
- 2) Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan:
 - a. Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA
 - b. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- 3) Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan:
 - a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan
 - b. Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar
 - c. Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - e. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas.
 - g. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat
 - h. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - i. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat
 - j. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - k. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Ketahanan Pangan
 - l. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - m. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat
 - n. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - o. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat
 - p. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - q. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat
 - r. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - s. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah.
 - t. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat
 - u. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - v. Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi.
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
 - a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Balai Cadangan Pangan
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat
 - i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
 - j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair.
 - k. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
 - l. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Cadangan Pangan (BCP)
 - m. Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan.

- n. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat
 - o. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Cadangan Pangan (BCP)
- 6) Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Sasaran kegiatan adalah aparat provinsi dan kabupaten/kota serta kelompok masyarakat antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), wanita tani, PKK, dan sebagainya. Secara terinci matriks target keluaran dan pagu indikatif tahun 2018 tersaji pada Tabel 3.2.

TABEL 3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cata- tan Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
02	03			Pangan								
02	03	01		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah regulasi kedaulatan pangan		1					
					Ketersediaan pangan utama (ton beras)		5,816,198					
					Persentase Penguatan cadangan pangan		100					
					Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, harga dan akses pangan di daerah		100					
					Persentase Penanganan daerah rawan pangan		60	12.890.120.000				13.583.750.000
02	03	01	0008	Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi Jawa Tengah	35 Kabupaten/Kot a	333 ton GKG	5.365.120.000	APBD			3.296.000.000

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cata- tan Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	03	01	0029	Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	1) Jumlah desa mandiri pangan , 2) Penyusunan Peta dan Analisa SKPG	Kabupaten Pati, Purworejo, Demak, Pemalang, Kendal, Batang, Banyumas, Jepara, Sukoharjo, Kebumen	1) 30 desa baru, 2) 1 paket	3.700.000.000	APBD			4.400.000.000
02	03	01	0032	Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dikembangkan	Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Kendal, Kebumen, Purbalingga, Purworejo, Jepara, Demak, Pati, Wonogiri, Karanganyar, Sragen	40 kelompok lumbung	800.000.000	APBD			1.567.500.000
02	03	01	0033	Kegiatan Penyusunan Regulasi dan Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan	1) Jumlah pertemuan koordinasi penyusunan regulasi ketahanan pangan, 2) Rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	35 Kabupaten/Kota	2) 2 kali, 2) 2 kali	675.000.000	APBD			880.000.000
02	03	01	0034	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan	1) Terpantaunya ketersediaan pangan, 2) Tersedianya hasil analisa NBM	35 Kabupaten/Kota	1) 1 tahun, 2) 1 laporan	150.000.000	APBD			220.000.000

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cata- tan Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	03	01	0035	Kegiatan Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan	1) Pertemuan pemantauan LP2B 2) terlaksananya pengembangan komoditi pangan lokal	Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Batang, Kota Salatiga	1) 1 kali 2) 3 kelompok Kelompok	200.000.000	APBD			385.000.000
02	03	01	0036	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Penguatan Akses Pangan	1) Tersedianya hasil analisa pasokan dan akses pangan, 2) Tersedianya fasilitas pengembangan distribusi pangan	Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Grobogan, Pati, Rembang, Blora, Jepara, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Magelang, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kudus, Demak, Semarang, Batang, Kendal, Brebes, Cilacap, Temanggung, Wonosobo, Kota Semarang, Kota	1) 1 laporan, 2) 58 gapoktan	1.550.000.000	APBD			2.117.500.000

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cata- tan Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Magelang dan Kota Salatiga						
02	03	01	0037	Kegiatan Pemantauan Pasokan, Harga dan Stabilisasi Pangan Strategis	Informasi harga pangan strategis	35 Kabupaten/ Kota		450.000.000	APBD			717.750.000
02	03	02		Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan			87	2.650.000.000				3.905.770.000
02	03	02	0003	Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	Jumlah KWT pekarangan yang difasilitasi	35 Kabupaten /Kota	120 KWT	1.675.000.000	APBD			2.640.770.000
02	03	02	0004	Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	1) Jumlah KWT pengolah pangan alternatif yang difasilitasi, 2) Jumlah promosi pangan alternatif, 3) jejaring pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	35 Kabupaten/ Kota	1) 48 KWT, 2) 6 paket, 3) 1 paket	975.000.000	APBD			1.265.000.000
02	03	03		Program Peningkatan Mutu			80	1.485.000.000				2.299.500.000

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cata- tan Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Keamanan Pangan								
02	03	03	0007	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pelaku/kelompok pangan segar yang terfasilitasi	20 Kabupaten (Kabupaten Batang, Pekalongan, Pemalang, Kudus, Pati, Jepara, Blora, Grobogan, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Semarang, Purworejo)	30 kelompok/pelaku usaha	450.000.000	APBD			704.500.000
02	03	03	0008	Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar	Jumlah Sertifikasi Prima 3 dan Nomor Pendaftaran PSAT	Kota Semarang, Purbalingga, Banjarnegara, Karanganyar, Boyolali, Wonosobo, Wonogiri, Demak, Pati, Klaten, Sragen,	7 Prima 3 dan 32 PSAT	725.000.000	APBD			990.000.000

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cata- tan Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sukoharjo, Grobogan, Cilacap, Kebumen, Kendal, Magelang, Tegal, Blora, Batang						
02	03	03	0009	Kegiatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Jumlah informasi keamanan pangan	35 Kabupaten/ Kota	12 Bulan	310.000.000	APBD			605.000.000
05				NON URUSAN (EKS BAU)								
05	01			NON URUSAN (EKS BAU)								
05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			48 SKPD	2.260.700.000				2.634.230.000
05	01	01	0001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 1 tahun di Sekretariat Dishanpan Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	20.000.000	APBD			24.000.000
					Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 1 tahun di BCP Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	5.000.000	APBD			6.000.000
TOTAL Per Kegiatan								25.000.000				30.000.000

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cata- tan Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	01	01	0002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik di Sekretariat Dishanpan Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	178.000.000	APBD			215.000.000
					Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik di BCP Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	27.000.000	APBD			32.600.000
TOTAL Per Kegiatan								205.000.000				247.600.000
05	01	01	0005	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya jaminan barang di Sekretariat Dishanpan dan BCP Prov. Jateng (gedung dan sarprasnya, kendaraan roda 4 dan roda 2)	Kantor Provinsi	1 Paket	85.000.000	APBD			102.850.000
TOTAL Per Kegiatan								85.000.000				102.850.000
05	01	01	0006	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	Tersedianya jasa kebersihan kantor di Sekretariat Dishanpan Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	191.400.000	APBD			210.000.000
TOTAL Per Kegiatan								191.400.000				210.000.000
05	01	01	0007	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK Kegiatan di Sekretariat	Kantor Provinsi	12 Bulan	95.000.000	APBD			114.950.000

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cata- tan Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dishanpan Prov. Jateng							
					Terpenuhinya Alat tulis kantor BCP Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	15.000.000	APBD			18.000.000
TOTAL Per Kegiatan								110.000.000				132.950.000
05	01	01	0008	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Terpenuhinya cetak dan penggandaan untuk administrasi kantor sekretariat Dishanpan Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	75.000.000	APBD			90.750.000
					Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan untuk administrasi, cetak plastik, karung kemasan cadangan pangan BCP Prov Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	5.000.000	APBD			6.000.000
TOTAL Per Kegiatan								80.000.000				96.750.000
05	01	01	0009	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya instalasi penerangan kantor Dishanpan Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	18.000.000	APBD			32.500.000
					Terpenuhinya instalasi penerangan kantor BCP Prov Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	3.000.000	APBD			3.630.000

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cata- tan Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL Per Kegiatan								21.000.000				36.130.000
05	01	01	0011	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor Dishanpan Prov Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	35.000.000	APBD			42.350.000
					Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor BCP Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	10.000.000	APBD			12.000.000
TOTAL Per Kegiatan								45.000.000				54.350.000
05	01	01	0012	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan kantor Dishanpan Prov Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	15.000.000	APBD			18.000.000
					Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan kantor BCP Prov Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	4.000.000	APBD			4.600.000
TOTAL Per Kegiatan								19.000.000				22.600.000
05	01	01	0014	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan minum kegiatan bagi pegawai Dishanpan Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	20.000.000	APBD			24.000.000

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cata- tan Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terpenuhinya kebutuhan makan minum kegiatan bagi pegawai BCP Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	3.000.000	APBD			4.000.000
TOTAL Per Kegiatan								23.000.000				28.000.000
05	01	01	0015	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	Kantor Provinsi	12 Bulan	550.000.000	APBD			605.000.000
TOTAL Per Kegiatan								550.000.000				605.000.000
05	01	01	0016	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan perkantoran Dishanpan Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	766.700.000	APBD			843.000.000
					Terpenuhinya pelayanan perkantoran BCP Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	104.600.000	APBD			115.000.000
TOTAL Per Kegiatan								871.300.000	APBD			958.000.000
05	01	01	0019	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	Terlaksananya publikasi ketahanan pangan	Kantor Provinsi	14 Paket	35.000.000	APBD			110.000.000
TOTAL Per Kegiatan								35.000.000				110.000.000
05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			48 SKPD	639.300.000				2.995.800.000

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cata- tan Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	01	02	0002	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor Dishanpan Prov Jateng	Kantor Provinsi	0 Unit	0				770.000.000
					Tersedianya kendaraan operasional BCP Prov Jateng	Kantor Provinsi	0 Unit	0				770.000.000
TOTAL Per Kegiatan								0				1.540.000.000
05	01	02	0009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor Dishanpan Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	92.300.000	APBD			316.800.000
					Terpeliharanya gedung kantor BCP Prov. Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	5.000.000	APBD			
TOTAL Per Kegiatan								97.300.000				336.600.000
05	01	02	0011	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor Dishanpan Prov Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	250.000.000	APBD			308.000.000
					Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan RMU BCP Prov Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	70.000.000	APBD			

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cata- tan Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL Per Kegiatan								320.000.000				440.000.000
05	01	02	0012	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor Dishanpan Prov Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	45.000.000	APBD			71.200.000
TOTAL Per Kegiatan								45.000.000				71.200.000
05	01	02	0014	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terpeliharanya meubelair kantor Dishanpan Prov Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	10.000.000	APBD			11.000.000
TOTAL Per Kegiatan								10.000.000				11.000.000
05	01	02	0015	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga Dishanpan Prov Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	50.000.000	APBD			194.400.000
					Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga BCP Prov Jateng	Kantor Provinsi	12 Bulan	4.000.000	APBD			7.000.000
TOTAL Per Kegiatan								54.000.000				201.400.000
05	01	02	0017	Kegiatan Pemeliharaan Buku- Buku Perpustakaan	Terlaksananya pemeliharaan buku perpustakaan	Kantor Provinsi	12 Bulan	3.000.000	APBD			3.600.000

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cata- tan Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dishanpan Prov Jateng							
TOTAL Per Kegiatan								3.000.000				3.600.000
05	01	02	0024	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor (komputer, laptop, printer) Dishanpan Prov Jateng	Kantor Provinsi	1 Paket	100.000.000	APBD			370.000.000
					Tersedianya sarana dan prasarana kantor BCP Prov Jateng	Kantor Provinsi	1 Paket	10.000.000	APBD			22.000.000
TOTAL Per Kegiatan								110.000.000				392.000.000
05	01	03		48 SKPD	50.000.000		48 SKPD	0				104.500.000
05	01	03	0001	12 Bulan	50.000.000	APBD	1 Paket	0	APBD			104.500.000
TOTAL Per Kegiatan								0				104.500.000
05	01	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								55.000.000
05	01	04	0001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal pegawai Dishanpan dan BCP Jateng	Kantor Provinsi						55.000.000

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cata- tan Pen- ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL Per Kegiatan					50.000.000				55.000.000
TOTAL					19.975.120.000				25.578.550.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 merupakan penjabaran proses pencapaian tujuan dinas ketahanan pangan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dishanpan 2013 – 2018. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Penyusunan Renja dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renja ini juga mendukung perwujudan visi “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”- Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi dengan bingkai kerangka ideologi Trisakti Bung Karno.

Renja dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renja merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan tahunan. Pada perjalanannya Renja Dinas Ketahanan Pangan dapat direview, jika target kinerja sudah terlampaui.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**